

BAB I

PENDAHULUAN

A. Gambaran Umum Organisasi

Inspektorat Provinsi Jawa Tengah dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Inspektorat dan Lembaga Teknis Daerah. Tugas pokok Inspektorat Provinsi Jawa Tengah adalah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota dan pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah Kabupaten/Kota.

Untuk melaksanakan Tugas Pokok sebagaimana dimaksud di atas, Inspektorat Provinsi Jawa Tengah menyelenggarakan fungsi :

1. Perencanaan program pengawasan;
2. Perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan bidang pembangunan, pemerintahan, dan kemasyarakatan;
3. Pemeriksaan, pengusutan, pengujian, dan penilaian tugas pengawasan;
4. Evaluasi dan pelaporan bidang pengawasan;
5. Pelaksanaan kesekretariatan Inspektorat;
6. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Disamping itu, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005, Inspektorat juga menjalankan fungsi yaitu :

1. Pemeriksaan dalam rangka berakhirnya masa jabatan kepala daerah;

2. Pemeriksaan berkala atau sewaktu-waktu maupun pemeriksaan terpadu;
3. Pengujian terhadap laporan berkala dan/atau sewaktu-waktu dari unit/satuan kerja;
4. Pengusutan atas kebenaran laporan mengenai adanya indikasi terjadinya penyimpangan, korupsi, kolusi dan nepotisme;
5. Penilaian atas manfaat dan keberhasilan kebijakan, pelaksanaan program dan kegiatan; dan
6. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah dan pemerintahan desa.

Adapun dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Inspektorat Provinsi Jawa Tengah didukung oleh Sumber Daya Manusia dengan perkembangan sebagai berikut :

1. Kondisi per 31 Desember 2013

Data PNS berdasarkan Jabatan :

STRUKTURAL				FUNGSIONAL				JUMLAH
				KHUSUS		UMUM		
Eselon I	Eselon II	Eselon III	Eselon IV	Auditor	P2UPD	Sekretariat	Staf Teknis	
-	1	5	3	31	23	55	3	121

Data PNS Berdasarkan Golongan :

NO	GOLONGAN / PANGKAT	a	b	c	d	JUMLAH
1	IV	14	6	0	1	21
2	III	5	30	21	31	87
3	II	4	5	3	1	13
4	I	0	0	0	0	0
JUMLAH						121

Data PNS Berdasarkan Pendidikan :

NO	PENDIDIKAN	JUMLAH
1	Sarjana S2	35
2	Sarjana S1/D-IV	68
3	Diploma/D-III	6
4	SLTA (Sederajat)	11
5	SLTP (Sederajat)	1
6	SD (Sederajat)	0
JUMLAH		121

2. Kondisi per 31 Desember 2014

Data PNS berdasarkan Jabatan :

STRUKTURAL				FUNGSIONAL				JUMLAH
				KHUSUS		UMUM		
Eselon I	Eselon II	Eselon III	Eselon IV	Auditor	P2UPD	Sekretariat	Staf Teknis	
-	1	5	3	34	23	55	1	122

Data PNS Berdasarkan Golongan :

NO	GOLONGAN / PANGKAT	a	b	c	d	JUMLAH
1	IV	23	6	0	1	30
2	III	4	22	29	24	79
3	II	3	6	3	1	13
4	I	0	0	0	0	0
JUMLAH						122

Data PNS Berdasarkan Pendidikan :

NO	PENDIDIKAN	JUMLAH
1	Sarjana S2	36
2	Sarjana S1/D-IV	68
3	Diploma/D-III	6
4	SLTA (Sederajat)	11
5	SLTP (Sederajat)	1
6	SD (Sederajat)	0
JUMLAH		122

Sementara untuk mendukung tupoksi tersebut Inspektorat Provinsi Jawa Tengah memiliki sarana dan prasarana dengan perkembangan sebagai berikut :

1. Kondisi per 31 Desember 2013

No.	NAMA ASET/BARANG	JUMLAH	NILAI (Rp.)
1.	Tanah	0	0
2.	Peralatan dan Mesin	1.731	5.265.584.96
	- <i>Alat-Alat Besar</i>	6	9
	- <i>Alat-Alat Angkutan</i>	16	169.042.000
	- <i>Alat Kantor dan Rumah Tangga</i>	1.674	1.571.235.401
	- <i>Alat-Alat Studio dan Komunikasi</i>	33	3.407.824.403
	- <i>Alat-Alat Laboratorium</i>	2	66.261.165
			51.222.000
3.	Gedung dan Bangunan (Bangunan Gedung/Kantor)	4	8.843.209.904
4.	Jalan, Irigasi dan Jaringan	0	0
5.	Aset Tetap Lainnya	2.639	23.141.050
	- <i>Buku Perpustakaan</i>	2.638	21.141.050
	- <i>Barang Bercorak Kesenian/ Kebudayaan</i>	1	2.000.000
6.	Konstruksi Dalam Pengerjaan	0	0
JUMLAH		4.374	14.131.935.923

2. Kondisi per 31 Desember 2014

No.	NAMA ASET/BARANG	JUMLAH	NILAI (Rp.)
1.	Tanah	0	0
2.	Peralatan dan Mesin	1.834	6.345.629.969
	- Alat-Alat Besar	6	169.042.000
	- Alat-Alat Angkutan	20	1.989.935.401
	- Alat Kantor dan Rumah Tangga	1.770	4.063.714.403
	- Alat-Alat Studio dan Komunikasi	36	71.716.165
	-Alat-Alat Laboratorium	2	51.222.000
3.	Gedung dan Bangunan (Bangunan Gedung/Kantor)	4	10.517.248.700
4.	Jalan, Irigasi dan Jaringan	0	0
5.	Aset Tetap Lainnya	2.639	23.141.050
	- Buku Perpustakaan	2.638	21.141.050
	- Barang Bercorak Kesenian/ Kebudayaan	1	2.000.000
6.	Konstruksi Dalam Pengerjaan	0	0
JUMLAH		4.477	16.886.019.719

B. Fungsi Strategis Inspektorat

Berdasarkan pada tugas pokok dan fungsi Inspektorat dimaksud, maka Inspektorat secara umum memiliki fungsi strategis yaitu **menciptakan sistem pengawasan yang efektif guna mendorong terciptanya *Good Governance***.

Secara singkat Inspektorat memiliki mandat yang harus dipertanggung jawabkan dalam kaitannya penggunaan sumber daya yang tercantum dalam Peraturan Gubernur No. 82 Tahun 2013 tentang Kebijakan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014, yaitu :

1. Pemeriksaan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota;
2. Pemeriksaan atas AMJ Bupati/Walikota;
3. Pemeriksaan atas Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi;
4. Pemeriksaan khusus/ strategis dengan tujuan tertentu;

5. Pemeriksaan atas pengaduan masyarakat pada Kabupaten/Kota;
6. Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD) Kabupaten/Kota;
7. Evaluasi Atas Implementasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Pemerintahan Kabupaten/Kota;
8. Pemantauan Perkembangan Penyelesaian Tindaklanjut Rekomendasi Pemeriksaan;
9. Pemantauan Penanganan Aduan Masyarakat yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten/Kota;
10. Pembinaan Jabatan Fungsional Khusus Auditor;
11. Pembinaan Jabatan Fungsional Khusus P2UPD;
12. Fasilitasi Pelaporan LHKPN Pejabat/ Penyeleng Negara Wajib Lapori LHKPN pada Kabupaten/Kota.

C. Permasalahan Utama yang dihadapi Inspektorat

Adapun permasalahan utama Inspektorat yang harus diselesaikan dalam rangka peningkatan kualitas dan kuantitas pengawasan di Jawa Tengah, secara singkat dapat di rinci sebagai berikut :

1. Kualitas dan kuantitas SDM yang belum memadai;
2. Belum optimalnya penerapan SPIP di SKPD Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Kabupaten/Kota;
3. Lemahnya koordinasi antar APIP dan instansi terkait lainnya;
4. Dualisme pembinaan sistem pengawasan;
5. Mandat yang diterima Inspektorat belum seluruhnya ditindaklanjuti;
6. Belum optimalnya sarana dan prasarana pendukung program pengawasan.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Perencanaan Strategis

1. Rencana Strategis (Renstra)

Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018 ditetapkan dengan Keputusan Inspektur Provinsi Jawa Tengah Nomor 1.463 Tahun 2014 tanggal 14 Mei 2014 memuat Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Indikator Sasaran, Target Jangka Menengah dan Target Tahunan sebagai berikut :

Visi :

Menjadi Aparat Pengawasan Internal Pemerintah Yang Mampu Mendorong Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Baik Di Jawa Tengah

Misi :

- a. Memantapkan kedudukan dan peran Inspektorat;**
- b. Meningkatkan profesionalisme aparatur pengawas;**
- c. Membangun kerjasama dengan APIP dan instansi terkait.**

Tujuan :

- a. Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang lebih baik di Jawa Tengah;
- b. Meningkatkan kapasitas aparat pengawasan intern pemerintah daerah yang profesional dan kompeten;

- c. Meningkatkan koordinasi dan sinergi pengawasan dengan APIP dan instansi terkait.

Sasaran :

- a. Tercapainya Laporan Keuangan Daerah dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian;
- b. Terwujudnya Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
- c. Terciptanya kinerja SKPD Provinsi Jawa Tengah yang efisien dan efektif.
- d. Meningkatnya kualitas SDM aparat pengawasan.
- e. Meningkatnya kualitas koordinasi pengawasan dengan APIP dan instansi terkait.

2. Indikator Kinerja Utama (IKU)

Indikator Kinerja Utama (IKU) Inspektorat Provinsi Jawa Tengah ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 82 Tahun 2014 sebagai berikut :

- a. Opini WTP atas LKPD Provinsi Jawa Tengah;
- b. Jumlah SKPD Provinsi Jawa Tengah yang menerapkan SPIP;
- c. Jumlah SKPD Provinsi Jawa Tengah yang kinerjanya efektif dan efisien;
- d. Prosentase penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) Aparat Pengawas Fungsional;
- e. Jumlah SKPD Provinsi Jawa Tengah yang mempunyai sarana pengaduan masyarakat berbasis Teknologi Informasi Komunikasi;
- f. Jumlah aparat pengawasan fungsional khusus yang mempunyai kemampuan profesionalisme di bidang pengawasan;

- g. Jumlah koordinasi yang dilakukan dengan APIP dan instansi terkait.

3. Target Indikator Kinerja Sasaran Strategis

Indikator Kinerja dan target kinerja tahunan dalam dokumen Renstra Inspektorat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018 sebagai berikut :

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET				
		2014	2015	2016	2017	2018
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Meningkatnya kualitas SDM aparat pengawasan	Jumlah SDM yang meningkat pemahamannya di bidang pengawasan	1 bintek ; 1 PKS; 50 orang	1 bintek ; 1 PKS; 50 orang	1 bintek ; 1 PKS; 50 orang	1 bintek ; 1 PKS; 50 orang	1 bintek ; 1 PKS; 50 orang
Meningkatnya kualitas koordinasi pengawasan dengan APIP dan instansi terkait	Jumlah koordinasi yang dilakukan dengan APIP dan instansi terkait	35 Kab/ Kota; 3 kegia tan	35 Kab/ Kota; 6 kegia tan	35 Kab/ Kota; 6 kegia tan	35 Kab/ Kota; 6 kegia tan	35 Kab/ Kota; 6 kegia tan
Tercapainya Laporan Keuangan Daerah dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian	1. Opini WTP 5 tahun ke depan di Provinsi Jawa Tengah; 2. Opini WTP 5 tahun ke depan untuk Kab/Kota	1 provi nsi; 13 Kab/ Kota	1 provi nsi; 16 Kab/ Kota	1 provi nsi; 22 Kab/ Kota	1 provi nsi; 28 Kab/ Kota	1 provi nsi; 35 Kab/ Kota
Terciptanya kinerja SKPD Provinsi Jawa Tengah yang efisien dan efektif	Meningkatnya kinerja SKPD Provinsi Jawa Tengah	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan
Terwujudnya Sistem Pengendalian Intern Pemerintah	Terselenggaranya Sistem Pengendalian Intern Pemerintah	2 SKPD	15 SKPD	59 SKPD	59 SKPD	59 SKPD

B. Perjanjian Kinerja 2014

Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (*outcome*) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup *outcome yang dihasilkan* dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Tujuan disusunnya Perjanjian Kinerja adalah :

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja Aparatur.
2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur.
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi.
4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah.
5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, Inspektur pada Tahun 2014 telah melakukan Perjanjian Kinerja dengan Gubernur Jawa Tengah untuk mewujudkan target kinerja sesuai lampiran perjanjian ini.

Guna mewujudkan kinerja yang telah diperjanjikan, maka Inspektorat Provinsi Jawa Tengah telah melaksanakan 8 (delapan) program 30 (tiga puluh) kegiatan yang didukung oleh DPA Perubahan Tahun Anggaran 2014 sebesar Rp. 36.713.433.000,00 namun demikian Penetapan Kinerja (PK) Inspektur Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 dengan Gubernur Jawa Tengah masih berdasarkan DPA Inspektorat Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2014 sejumlah Rp 31.851.895.000,00

Secara singkat gambaran mengenai keterkaitan antara Tujuan/sasaran, Indikator dan Target Kinerja yang telah disepakati antara Inspektur Provinsi Jawa Tengah dengan Gubernur Jawa Tengah Tahun 2014, secara lengkap tercantum pada Lampiran 1 .

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Sebagai tindak lanjut pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan tata cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, setiap instansi pemerintah wajib menyusun Laporan Kinerja yang melaporkan progres kinerja atas mandat dan sumber daya yang digunakannya .

Dalam rangka melakukan evaluasi keberhasilan atas pencapaian tujuan dan sasaran organisasi sebagaimana yang telah ditetapkan pada perencanaan jangka menengah, maka digunakan skala pengukuran sebagai berikut :

Skala Pengukuran Kinerja Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

NO	SKALA CAPAIAN KINERJA	KATEGORI
1	Lebih dari 100%	Sangat Baik
2	75 – 100%	Baik
3	55 – 74 %	Cukup
4	Kurang dari 55 %	Kurang

Pada tahun 2014, Inspektorat Provinsi Jawa Tengah telah melaksanakan seluruh program dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya.

Sesuai dengan Perjanjian Kinerja Inspektur Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 dan Rencana Strategis Inspektorat, setidaknya terdapat 5 (lima) sasaran strategis yang harus diwujudkan pada tahun ini, yaitu :

1. Sasaran Strategis 1 : Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Aparat Pengawasan

Untuk mengukur capaian kinerja pada sasaran 1, dimaksud maka dilakukan pengukuran kinerja sebagai berikut :

**Capaian Kinerja Sasaran Strategis 1
Meningkatnya kualitas SDM aparat pengawasan**

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	% Capaian Tahun 2013	% Capaian terhadap Target Akhir Renstra (2018)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Meningkatnya kualitas SDM aparat pengawasan	Jumlah SDM yang meningkat pemahamannya di bidang pengawasan	1 bintek;	1 bintek;	100%	100%	100%
		1 PKS;	2 PKS;	200%	100%	200%
		50 orang	114 orang	228%	100%	228%
Prosentase Capaian Sasaran Strategis 1				176%	100%	176%

Capaian indikator kinerja pada Sasaran Strategis 1, Meningkatkan Kualitas SDM Aparat Pengawasan sebesar 176% atau **kategori Sangat Baik**. Hal ini diukur dari Indikator Jumlah SDM yang meningkat pemahamannya dibidang pengawasan tercapai sebesar 176% melebihi target yang telah ditetapkan yaitu 100%.

Capaian kinerja Tahun 2014 pada Sasaran Strategis 1, **apabila dibandingkan dengan kondisi awal (Tahun 2013)**, sesungguhnya mengalami kenaikan, untuk tahun 2014 tercapai 176% sedangkan tahun 2013 tercapai 100%. Hal ini berarti terjadi peningkatan capaian kinerja sebesar 76%.

Untuk **realisasi kinerja sampai dengan tahun 2014 apabila dibandingkan dengan target jangka menengah** yang telah ditetapkan dalam perencanaan strategis Inspektorat telah tercapai 176%.

Realisasi sumber daya keuangan untuk pencapaian Sasaran Strategis 1, adalah sebesar Rp 353.734.606,- atau 95,09 % dari total pagu sebesar Rp 372.000.000,-. Hal ini berarti terdapat efisiensi sebesar Rp. 18.265.394,00 atau 4,91% dari pagu yang ditentukan.

Capaian kinerja sasaran 1 didukung dari pelaksanaan Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan melalui Kegiatan Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan serta Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur melalui Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal.

2. Sasaran Strategis 2 : Meningkatkan Kualitas Koordinasi Pengawasan dengan APIP dan Instansi Terkait

Untuk mengukur capaian kinerja pada sasaran 2, dimaksud maka dilakukan pengukuran kinerja sebagai berikut :

**Capaian Kinerja Sasaran Strategis 2
Meningkatnya Kualitas Koordinasi Pengawasan
dengan APIP dan Instansi Terkait**

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	% Capaian Tahun 2013	% Capaian terhadap Target Akhir Renstra (2018)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Meningkatnya kualitas koordinasi pengawasan dengan APIP dan instansi terkait	Jumlah koordinasi yang dilakukan dengan APIP dan instansi terkait	35 Kab/ Kota;	35 Kab/ Kota;	100%	100%	100%
		3 kegiatan	3 kegiatan	100%	100%	50%
Prosentase Capaian Sasaran Strategis 2				100%	100%	75%

Capaian indikator kinerja pada Sasaran Strategis 2, meningkatnya kualitas koordinasi pengawasan dengan APIP dan instansi terkait sebesar 100% atau **kategori baik**. Hal ini diukur dari indikator jumlah koordinasi yang dilakukan dengan APIP dan instansi terkait sejumlah 35 Kab/ Kota; 3 kegiatan, sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

Kegiatan koordinasi pengawasan yang ditargetkan sebanyak 3 kegiatan, dilakukan antara APIP Provinsi Jawa Tengah dengan APIP Provinsi Jawa Timur, Provinsi Sulawesi Selatan dan Kabupaten Badung Provinsi Bali.

Capaian kinerja Tahun 2014 pada Sasaran Strategis 2, **apabila dibandingkan dengan konsisi awal (Tahun 2013) adalah sama**, dengan tingkat capaian sebesar 100%.

Untuk **realisasi kinerja sampai dengan tahun 2014 apabila dibandingkan dengan target jangka menengah** yang telah ditetapkan dalam perencanaan strategis Inspektorat telah tercapai 75%.

Realisasi sumber daya keuangan untuk pencapaian Sasaran 2, adalah sebesar Rp 554.174.915,- atau sebesar 95,25% dari total pagu sebesar Rp 581.825.000,-. Hal ini berarti terdapat efisiensi sebesar Rp. 27.650.085,00 atau 4,75% dari pagu yang ditentukan.

Capaian kinerja sasaran 2, sesungguhnya tidak terlepas dari pelaksanaan Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Kebijakan Kepala Daerah melalui Kegiatan Koordinasi Pengawasan yang Lebih Komprehensif.

3. Sasaran 3 : Tercapainya Laporan Keuangan Daerah dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian

Untuk mengukur capaian kinerja pada sasaran 3, dimaksud maka dilakukan pengukuran kinerja sebagai berikut :

**Capaian Kinerja Sasaran Strategis 3
Tercapainya Laporan Keuangan Daerah dengan
Opini Wajar Tanpa Pengecualian**

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	% Capaian Tahun 2013	% Capaian terhadap Target Akhir Renstra (2018)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Tercapainya Laporan Keuangan Daerah dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian	1. Opini WTP 5 tahun ke depan di Provinsi Jawa Tengah;	1 Provinsi;	1 Provinsi;	100%	100%	100%
	2. Opini WTP 5 tahun ke depan untuk Kab/Kota;	13 Kab/Kota	10 Kab/Kota	76,92%	100%	28,57%
Prosentase Capaian Sasaran Strategis 3				88,46%	100%	64,29%

Capaian indikator kinerja pada Sasaran Strategis 3, Tercapainya Laporan Keuangan Daerah dengan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) sebesar 88,46% atau **kategori baik**.

Target Tahun 2014 selain Opini WTP dari BPK untuk Pemerintah Provinsi yang sudah tercapai, ditargetkan pula 13 Kab./Kota juga telah WTP, namun demikian baru terealisasi sebanyak 10 Kab./Kota.

Pemerintah Kab./Kota yang mendapatkan opini WTP Tahun 2014 adalah

1. Kota Surakarta;
2. Kota Semarang;
3. Kabupaten Jepara;
4. Kabupaten Semarang;
5. Kabupaten Boyolali;
6. Kabupaten Banyumas;
7. Kabupaten Temanggung;
8. Kabupaten Purworejo;
9. Kabupaten Kudus;
10. Kabupaten Banjarnegara;

Capaian kinerja Tahun 2014 pada Sasaran Strategis 3, **apabila dibandingkan dengan kondisi awal (Tahun 2013)**, maka pencapaian kinerja Tahun 2014 mengalami penurunan sebesar 11,54%. Hal ini terjadi karena belum ada perkembangan penambahan status WTP atas Laporan Keuangan Daerah pada Pemerintah Kab./Kota. Oleh karena itu perlu upaya secara signifikan agar target yang telah ditentukan dapat dicapai.

Untuk **realisasi kinerja sampai dengan tahun 2014 apabila dibandingkan dengan target jangka menengah** yang telah ditetapkan dalam perencanaan strategis Inspektorat telah tercapai 64,29%.

Hambatan dan kendala yang dihadapi dalam pencapaian Sasaran 3, antara lain :

1. Adanya target kinerja yang berada di luar kewenangan langsung Pemerintah Provinsi, sehingga sulit untuk melakukan intervensi secara langsung terhadap peningkatan status WTP di lingkungan Pemerintah Kab./Kota.
2. Belum sinkron dan fokusnya perencanaan antara target kinerja yang ditetapkan dengan program dan kegiatan untuk mencapai target yang diwujudkan.

Adapun alternatif solusi yang telah dilakukan untuk mencapai target pada tahun selanjutnya adalah melalui :

1. Perlu perbaikan perencanaan, agar program dan kegiatan diorientasikan untuk mencapai target yang telah ditetapkan.
2. Mengoptimalkan koordinasi dan sinkronisasi bidang pengawasan dan pelaporan keuangan pada pemerintah Kab./Kota agar terjadi progres peningkatan pencapaian WTP di masa mendatang.

Realisasi sumber daya keuangan untuk pencapaian Sasaran Strategis 3, adalah sebesar Rp 9.596.203.881,- atau sebesar 93,14% dari total pagu sebesar Rp 10.302.797.000,-. Hal ini berarti terdapat efisiensi sebesar Rp. 706.593.189,00 atau 6,86% dari Pagu yang ditentukan.

Capaian kinerja Sasaran Strategis 3, didukung oleh pelaksanaan program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Kebijakan Kepala Daerah dengan kegiatan sebagai berikut :

1. Kegiatan Pengawasan Internal Secara Berkala;
2. Penanganan Kasus Pengaduan dilingkungan Pemda,
Pemeriksaan Khusus/Strategis atas perintah pejabat yang berwenang dan Monev;
3. Kegiatan Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan;

4. Kegiatan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

4. Sasaran 4 : Terciptanya Kinerja SKPD Provinsi Jawa Tengah yang Efisien dan Efektif

Untuk mengukur capaian kinerja pada Sasaran Strategis 4, dimaksud maka dilakukan pengukuran kinerja sebagai berikut :

**Capaian Kinerja Sasaran Strategis 4
Terciptanya Kinerja SKPD Provinsi Jawa Tengah
yang Efisien dan Efektif**

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	% Capaian Tahun 2013	% Capaian terhadap Target Akhir Renstra (2018)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Terciptanya kinerja SKPD (Inspektorat) Provinsi Jawa Tengah yang efisien dan efektif	Meningkatnya kinerja SKPD (Inspektorat) Provinsi Jawa Tengah	12 bulan	12 bulan	100%	100%	100%
Prosentase Capaian Sasaran Strategis 4				100%	100%	100%

Capaian indikator kinerja pada Sasaran Strategis 4, Terciptanya kinerja SKPD Provinsi Jawa Tengah yang efisien dan efektif sebesar 100% atau **kategori baik**. Hal ini diukur dari indikator meningkatnya kinerja SKPD Provinsi Jawa Tengah selama 12 bulan sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Pencapaian kinerja ini diperoleh melalui capaian kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

No.	Kegiatan	Target	Realisasi	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				
1.	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	2 unit Kendaraan Dinas Operasional	2 unit Kendaraan Dinas Operasional	100,00

INSPEKTORAT PROVINSI JAWA TENGAH

No.	Kegiatan	Target	Realisasi	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		Roda 4 dan 2 unit kendaraan dinas operasional Roda 2	Roda 4 dan 2 unit kendaraan dinas operasional Roda 2	
2.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	1 Gedung	1 Gedung	100,00
3.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional	25 unit	25 unit	100,00
4.	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan Gedung Kantor	9 unit	9 unit	100,00
5.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Meubelair	100 buah/ 1 set	100 buah/ 1 set	100,00
6.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor dan Rumah Tangga	35 buah dan 87 unit	35 buah dan 87 unit	100,00
7.	Pemeliharaan Buku – buku Perpustakaan	1.000 M3	1.000 M3	100,00
8.	Peningkatan sarana dan Prasarana Kantor	1 Paket, 74 unit, dan 21 buah, 5 set	1 Paket, 74 unit, dan 21 buah, 5 set	100,00
9.	Rehabilitasi/Renovasi Sedang/Berat Gedung Kantor	Perbaikan dinding depan 860 m ² , penggantian keramik Lt. 5 dan 6 = 1.300 m ² , pemasangan partisi, perbaikan meja reseptionis 2 set	Perbaikan dinding depan 860 m ² , penggantian keramik Lt. 5 dan 6 = 1.300 m ² , pemasangan partisi, perbaikan meja reseptionis 2 set	100,00
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				
1.	Penyediaan Surat Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4.700 surat	4,700 Surat	100,00
2.	Jasa Komunikasi, Sumber	1 Tahun	1 Tahun	100,00

No.	Kegiatan	Target	Realisasi	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Daya Alam dan Listrik			
3.	Jaminan Barang Milik Daerah	1 Gedung dan 15 unit	1 Gedung dan 15 unit	100,00
4.	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor/ Rumah Dinas	1 Gedung	1 Gedung	100,00
5.	Penyediaan Alat Tulis Kantor	1 Tahun	1 Tahun	100,00
6.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	1 Tahun	1 Tahun	100,00
7.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	1 Tahun	1 Tahun	100,00
8.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga.	16 unit tabung pemadam kebakaran dan 15 unit tabung gas	16 unit tabung pemadam kebakaran dan 15 unit tabung gas	100,00
9.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Per- UU	120 exp	120 exp	100,00
10.	Penyediaan Makanan dan Minuman	1 Tahun	1 Tahun	100,00
11.	Rapat - rapat Koordinasi & Konsultasi di Dalam dan Luar Daerah.	81 Pengawasan reguler dan penunjang pengawasan dalam dan luar daerah, fasilitasi Jabatan auditor pada 35 Kab/ Kota, monitoring inpasing 35 Kab/ Kota, monitoring wajib LHKPN di 35 Kab/ Kota dan Provinsi (221 Kegiatan)	81 Pengawasan reguler dan penunjang pengawasan dalam dan luar daerah, fasilitasi Jabatan auditor pada 35 Kab/ Kota, monitoring inpasing 35 Kab/ Kota, monitoring wajib LHKPN di 35 Kab/ Kota dan Provinsi (230 Kegiatan)	100,00
12.	Jasa Pelayanan Perkantoran	1 Tahun	1 Tahun	100,00

No.	Kegiatan	Target	Realisasi	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Program Peningkatan Disiplin Aparatur				
1.	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	272 stell	252 stell	100,00

Capaian kinerja Tahun 2014 pada Sasaran Strategis 2, **apabila dibandingkan dengan konsisi awal (Tahun 2013) adalah sama**, dengan tingkat capaian sebesar 100%.

Untuk **realisasi kinerja sampai dengan tahun 2014 apabila dibandingkan dengan target jangka menengah** yang telah ditetapkan dalam perencanaan strategis Inspektorat telah tercapai 100%.

Realisasi sumber daya keuangan untuk pencapaian Sasaran Strategis 4, adalah sebesar Rp 8.483.398.728,- atau sebesar 97,81% dari total pagu sebesar Rp 8.673.185.000 ,-. Hal ini berarti terdapat efisiensi sebesar Rp 189.786.272,00 atau 2,18% dari pagu yang ditentukan.

Capaian kinerja Sasaran Strategis 4, didukung oleh pelaksanaan program dan kegiatan sebagai berikut :

1. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
 - Kegiatannya antara lain adalah
 - a. Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
 - b. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
 - c. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaran Dinas/ Operasional
 - d. Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan Gedung Kantor
 - e. Pemeliharaan Rutin/Berkala Meubelair
 - f. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor dan Rumah Tangga
 - g. Pemeliharaan Buku – buku Perpustakaan

- h. Peningkatan sarana dan Prasarana Kantor
- i. Rehabilitasi/Renovasi Sedang/Berat Gedung Kantor
- 2. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Kegiatannya antara lain adalah
 - a. Penyediaan Surat Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - b. Jasa Komunikasi, Sumber Daya Alam dan Listrik
 - c. Jaminan Barang Milik Daerah
 - d. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor/ Rumah Dinas
 - e. Penyediaan Alat Tulis Kantor
 - f. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - g. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor
 - h. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga.
 - i. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Per- UU
 - j. Penyediaan Makanan dan Minuman
 - k. Rapat - rapat Koordinasi & Konsultasi di Dalam dan Luar Daerah.
 - l. Jasa Pelayanan Perkantoran
- 3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Kegiatannya antara lain adalah Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
- 5. **Sasaran 5** : Terwujudnya Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)
Untuk mengukur capaian kinerja pada sasaran 5, dimaksud maka dilakukan pengukuran kinerja sebagai berikut :

**Capaian Kinerja Sasaran Strategis 5
Terciptanya Kinerja SKPD Provinsi Jawa Tengah
yang Efisien dan Efektif**

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	% Capaian Tahun 2013	% Capaian terhadap Target Akhir Renstra (2018)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Terwujudnya Sistem Pengendalian Intern Pemerintah	Terselenggaranya Sistem Pengendalian Intern Pemerintah	2 SKPD	2 SKPD	100%	0%	3,39%
Prosentase Capaian Sasaran Strategis 5				100%	0%	3,39%

Capaian indikator kinerja pada sasaran Terwujudnya Sistem Pengendalian Intern Pemerintah masuk dalam kategori. Hal ini diukur dari Indikator Terselenggaranya Sistem Pengendalian Intern Pemerintah tercapai 2 SKPD sesuai dengan target yang telah ditetapkan. 2 SKPD yang telah menyelenggarakan SPIP adalah Inspektorat Provinsi Jawa Tengah dan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah.

Capaian kinerja Tahun 2014 pada Sasaran Strategis 5, **apabila dibandingkan dengan konsisi awal (Tahun 2013)**, sesungguhnya mengalami **peningkatan sebesar 100%**. Hal ini dikarenakan pada Tahun 2013 belum terdapat SKPD yang melaksanakan SPIP (0%).

Untuk **realisasi kinerja sampai dengan tahun 2014 apabila dibandingkan dengan target jangka menengah** yang telah ditetapkan dalam perencanaan strategis Inspektorat telah tercapai 3,39%.

Hambatan dan kendala yang dihadapi dalam pencapaian Sasaran 5, antara lain :

1. Implementasi SPIP yang masih minim di lingkup Pemerintahan Daerah, baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota;
2. Format dan sistematika penerapan SPIP yang masih berbeda-beda berimplikasi terhadap peraturan yang disusun menjadi tidak sama antar instansi pemerintahan yang satu dengan yang lainnya;
3. Masih banyak SKPD yang belum dapat membedakan penyelenggaraan SPIP dengan Sistem Pengendalian Intern yang selama ini sudah dilakukan di beberapa SKPD dan Rumah Sakit.

Adapun alternatif solusi yang telah dilakukan untuk mencapai target pada tahun selanjutnya adalah melalui :

1. Menyusun peraturan pelaksana terkait dengan penyelenggaraan SPIP guna mempermudah SKPD dalam menyusun Rencana Tindak Pengendalian (RTP) sebagai output dari penyelenggaraan SPIP.
2. Sosialisasi yang intens kepada SKPD terkait dengan penyelenggaraan SPIP.

Realisasi sumber daya keuangan untuk pencapaian Sasaran Strategis 5, adalah sebesar Rp 784.000.545,- atau sebesar 73,33% dari total pagu sebesar Rp 1.069.073.000,-. Hal ini berarti terdapat efisiensi sebesar Rp 285.072.455,00 atau 26,67% dari Pagu yang ditentukan.

Capaian kinerja Sasaran Strategis 5 didukung oleh pelaksanaan program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal

dan Pengendalian Kebijakan Kepala Daerah melalui Kegiatan Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan KDH.

B. Realisasi Anggaran

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Provinsi Jawa Tengah, pada Tahun Anggaran 2014, didukung dengan Anggaran sebesar Rp. 36.713.433.000,00. Anggaran tersebut 100% bersumber dari APBD. Secara ringkas komposisi penggunaan anggaran terdiri dari Belanja Tindak Lanjut sebesar Rp. 15.714.553.000,00 dan Belanja Langsung sebesar Rp. 20.998.880.000,00 dengan rincian sebagai berikut :

1. Belanja Pegawai, sebesar Rp. 752.799.000,00
2. Belanja Barang dan Jasa, sebesar Rp. 17.636.720.000,00
3. Belanja Modal, sebesar Rp. 2.609.361.000,00

Penggunaan anggaran tersebut apabila diperinci dalam mendukung pencapaian sasaran adalah sebagai berikut :

Sasaran	Program	Anggaran	Realisasi	% Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Meningkatnya kualitas SDM aparat pengawasan	Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	130.000.000	119.891.900	92,22%
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	242.000.000	233.842.706	96,63%
Meningkatnya kualitas koordinasi pengawasan dengan APIP dan instansi terkait	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Kebijakan Kepala Daerah	581.825.000	554.174.915	95,25%
Tercapainya Laporan	Program Peningkatan Sistem	10.302.797.000	9.596.203.811	93,14%

Sasaran	Program	Anggaran	Realisasi	% Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Kuangan Daerah dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian	Pengawasan Internal dan Pengendalian Kebijakan Kepala Daerah			
Terciptanya kinerja SKPD Provinsi Jawa Tengah yang efisien dan efektif	Program Peningkatan sarana dan Prasarana Aparatur	4.150.848.000	4.065.075.702	97,93%
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	4.376.953.000	4.306.455.026	98,39%
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	145.384.000	111.868.000	76,95%
Terwujudnya Sistem Pengendalian Intern Pemerintah	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Kebijakan Kepala Daerah	1.069.073.000	784.000.545	73,33%
Jumlah		20.998.880.000	19.771.512.605	94,16%

Dilihat dari sisi penyerapan anggaran, Tahun 2013 terjadi efisiensi sebesar Rp 2.063.331.652 atau 7,47% sedangkan pada Tahun 2014 terdapat efisiensi sebesar Rp. 3.510.850.930,00 atau 9,56% yang terdiri dari efisiensi Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 2.283.483.535,00 (6,22%) dan efisiensi Belanja Langsung sebesar Rp. 1.227.367.395,00 (5,84%), maka realisasi efisiensi anggaran belanja tahun 2014 mengalami peningkatan sebesar 2,09%.

C. KINERJA LAIN-LAIN

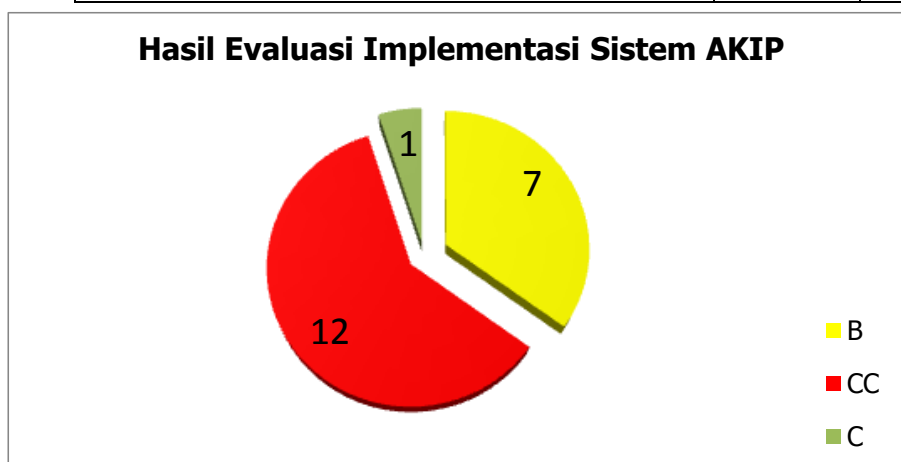
Inspektorat Provinsi Jawa Tengah mempunyai tambahan tugas untuk menindaklanjuti kebijakan/ program nasional khususnya dalam rangka penguatan pengawasan di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa yang meliputi :

1. Evaluasi Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)

Dilaksanakan pada 20 (dua puluh) SKPD Provinsi Jawa Tengah dengan hasil 7 (tujuh) SKPD kategori B (Baik), 12 (dua belas) SKPD kategori Cukup Memadai (CC) dan 1 (satu) SKPD kategori Kurang (C), sebagai berikut :

SKPD	Nilai	Kategori
1	2	3
Dinas Pendidikan	73,05	B
Dinas Koperasi dan UMKM	69,79	B
Dinas Perhubungan Kominfo	69,06	B
Dinas ESDM	68,29	B
Dinas Perindustrian dan Perdagangan	67,94	B
Inspektorat	66,45	B
DPPAD	65,02	B
Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Kependudukan	63,77	CC
Dinas Bina Marga	63,44	CC
Dinas PSDA	61,51	CC
Dinas Kesehatan	61,50	CC
Dinas Sosial	61,07	CC
Dinas Ciptakaru	60,01	CC
Dinas Pertanian	59,57	CC

SKPD	Nilai	Kategori
1	2	3
Dinas Peternakan	58,95	CC
Dinas Kelautan dan Perikanan	57,27	CC
Dinas Kehutanan	56,97	CC
Dinas Perkebunan	55,80	CC
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	50,40	CC
Dinas Pemuda dan Olah Raga	46,55	C

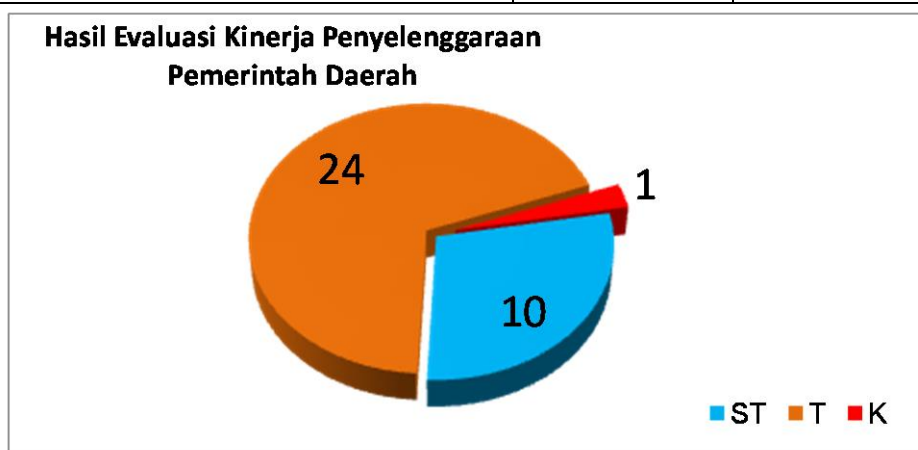


2. Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EKPPD)

Dilaksanakan pada 35 (tiga puluh lima) Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah dengan hasil 10 (sepuluh) Kabupaten/Kota mendapat prestasi Sangat Tinggi (ST), 24 (dua puluh empat) Kabupaten/Kota mendapat prestasi Tinggi (T) dan 1 (satu) Kabupaten/Kota mendapat prestasi Sedang sebagai berikut :

Kabupaten/Kota	Skor	Prestasi
1	2	3
Kabupaten Purbalingga	3,3106	ST
Kota Semarang	3,2473	ST
Kabupaten Banyumas	3,2075	ST
Kabupaten Pemalang	3,1151	ST
Kota Salatiga	3,0987	ST
Kabupaten Semarang	3,0724	ST
Kabupaten Temanggung	3,0684	ST
Kabupaten Boyolali	3,0447	ST
Kabupaten Kudus	3,0074	ST
Kabupaten Pati	3,0030	ST
Kota Surakarta	2,9885	T
Kabupaten Blora	2,9808	T
Kabupaten Cilacap	2,9782	T
Kabupaten Demak	2,9394	T
Kabupaten Banjarnegara	2,9070	T
Kabupaten Sukoharjo	2,8547	T
Kota Pekalongan	2,8226	T
Kabupaten Kendal	2,8176	T
Kabupaten Jepara	2,8129	T
Kabupaten Purworejo	2,8049	T
Kabupaten Rembang	2,7956	T
Kabupaten Kebumen	2,7923	T
Kabupaten Brebes	2,7558	T
Kabupaten Klaten	2,7257	T
Kabupaten Wonogiri	2,6232	T
Kabupaten Grobogan	2,5954	T

Kabupaten/Kota	Skor	Prestasi
1	2	3
Kabupaten Sragen	2,5139	T
Kota Magelang	2,4859	T
Kota Tegal	2,4819	T
Kabupaten Batang	2,4586	T
Kabupaten Magelang	2,3644	T
Kabupaten Karanganyar	2,2943	T
Kabupaten Pekalongan	2,2287	T
Kabupaten Wonosobo	2,1838	T
Kabupaten Tegal	1,5750	S



3. Pengendalian Gratifikasi, pada Tahun 2014 Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah melaksanakan Training of trainer (TOT), Pelatihan Pejabat Eselon II, workshop dan pembentukan Tim Program Pengendalian Gratifikasi pada seluruh SKPD sehingga diharapkan SKPD tersebut dapat menjadi agen Program Pengendalian Gratifikasi (PPG). Sebagai bentuk komitmen Gubernur Jawa Tengah bersama dengan KPK telah menandatangani komitmen Penerapan Pengendalian Gratifikasi pada tanggal 17 Januari 2014.

4.LHKPN, merupakan salah satu upaya strategis pencegahan korupsi melalui penerapan azas transparansi bagi aparatur negara. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah menerapkan hal ini dan pada Tahun 2013 seluruh eselon II di Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah melaporkan sedangkan Tahun 2014 ini sesuai dengan SK Gubernur Jawa Tengah No. 770/4 tanggal 2 Juni 2014 seluruh pejabat eselon dan BUMD wajib untuk melaporkan LHKPN sebagai persyaratan seleksi pengangkatan Pejabat Struktural. Hasil penyampaian LHKPN kondisi per 31 Desember 2014 untuk eselon III dan IV sebanyak 1.698 orang dari 1.698 orang (100%).

5.PMPRB merupakan salah satu alat untuk mengukur perkembangan Reformasi Birokrasi disuatu daerah. Adapun penilaiannya menggunakan perbandingan Nilai Komponen Pengungkit (Manajemen Perubahan, Penataan Perundang-Undangan, Penataan & Penguatan Organisasi, Penataan Tatalaksana, Penataan Sistem Manajemen SDM, Akuntabilitas, Penguatan Pengawasan, dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik) dibandingkan dengan Nilai Komponen Hasil (Kapasitas & Akuntabilitas Kinerja Organisasi, Pemerintah yang bersih dan bebas KKN, DAN Kualitas Pelayanan Publik). Berdasarkan hasil PMPRB Tahun 2014, Provinsi Jawa Tengah memperoleh Indeks Reformasi Birokrasi sebesar 62,22 (Baik).

BAB IV
P E N U T U P

A. Tinjauan Umum Capaian Kinerja Inspektorat

Inspektorat Prov. Jawa Tengah adalah SKPD yang mempunyai tugas pokok melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota dan pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah Kabupaten/Kota. Agar pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut berjalan secara optimal maka diperlukan pengelolaan SDM, sumber dana dan sarana secara efektif dan efisien mungkin .

Dengan memperhatikan uraian dan beberapa data tersebut di atas, maka dapat dikatakan bahwa Inspektorat Prov. Jawa Tengah dalam melaksanakan tugasnya dapat dikatakan berhasil, karena dari 5 (lima) target sasaran yang telah ditetapkan **1 (satu) sasaran dicapai dengan kategori Amat Baik** dan **4 (empat) sasaran lainnya dicapai dengan kategori Baik**. Hal tersebut didukung dengan data sebagai berikut :

1. Hasil Pengukuran Rata-Rata Pencapaian seluruh Sasaran Strategis Inspektorat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 sebesar **112,89%**.
2. Rata-rata pencapaian sasaran strategis “Meningkatnya kualitas SDM aparat pengawasan” sebesar **176% (Amat Baik)**;
3. Rata-rata pencapaian sasaran strategis “Meningkatnya kualitas koordinasi pengawasan dengan APIP dan instansi terkait” sebesar **100% (Baik)**.

4. Rata-rata pencapaian sasaran strategis “Tercapainya Laporan Keuangan Daerah dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian” sebesar **88,46% (Baik)**.
5. Rata-rata pencapaian sasaran strategis “Terciptanya kinerja SKPD Provinsi Jawa Tengah yang efisien dan efektif” sebesar **100% (Baik)**.
6. Rata-rata pencapaian sasaran strategis “Terwujudnya Sistem Pengendalian Intern Pemerintah” sebesar **100% (Baik)**.
7. Tingkat efisiensi total penggunaan anggaran Inspektorat Provinsi Jawa Tengah untuk pencapaian target kinerja tahun 2014 sebesar **9,56%**.
8. Tingkat efisiensi penggunaan anggaran terbesar dicapai untuk sasaran “Meningkatnya kualitas SDM aparat pengawasan” sebesar **4,91%**.
9. Tingkat efisiensi penggunaan anggaran terbesar dicapai untuk sasaran “Meningkatnya kualitas koordinasi pengawasan dengan APIP dan instansi terkait” sebesar **4,75%**.
10. Tingkat efisiensi penggunaan anggaran terbesar dicapai untuk sasaran “Tercapainya Laporan Keuangan Daerah dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian” sebesar **6,86%**.
11. Tingkat efisiensi penggunaan anggaran terbesar dicapai untuk sasaran “Terciptanya kinerja SKPD Provinsi Jawa Tengah yang efisien dan efektif” sebesar **2,18%**.

12. Tingkat efisiensi penggunaan anggaran terbesar dicapai untuk sasaran "Terwujudnya Sistem Pengendalian Intern Pemerintah" sebesar **26,67%**.

B. Permasalahan/Kendala

Permasalahan atau kendala yang ditemui dalam pencapaian target kinerja Inspektorat Provinsi Jawa Tengah tahun 2014 antara lain :

1. Adanya target kinerja yang berada di luar kewenangan langsung Pemerintah Provinsi, sehingga sulit untuk melakukan intervensi secara langsung terhadap peningkatan status WTP di lingkungan Pemerintah Kab./Kota;
2. Belum sinkron dan fokusnya perencanaan antara target kinerja yang ditetapkan dengan program dan kegiatan untuk mencapai target yang diwujudkan;
3. Implementasi SPIP yang masih minim di lingkup Pemerintahan Daerah, baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota;
4. Format dan sistematika penerapan SPIP yang masih berbeda-beda berimplikasi terhadap peraturan yang disusun menjadi tidak sama antar instansi pemerintahan yang satu dengan yang lainnya;
5. Masih banyak SKPD yang belum dapat membedakan penyelenggaraan SPIP dengan Sistem Pengendalian Intern yang selama ini sudah dilakukan di beberapa SKPD dan Rumah Sakit.

C. Strategi Untuk Peningkatan Kinerja di Masa Datang

Strategi yang diperlukan guna meningkatkan kinerja Inspektorat Provinsi Jawa Tengah di masa mendatang antara lain :

1. Perlu perbaikan perencanaan, agar program dan kegiatan diorientasikan untuk mencapai target yang telah ditetapkan;
2. Mengoptimalkan koordinasi dan sinkronisasi bidang pengawasan dan pelaporan keuangan pada pemerintah Kab./Kota agar terjadi progres peningkatan pencapaian WTP di masa mendatang;
3. Menyusun peraturan pelaksana terkait dengan penyelenggaraan SPIP guna mempermudah SKPD dalam menyusun Rencana Tindak Pengendalian (RTP) sebagai output dari penyelenggaraan SPIP.
4. Sosialisasi yang intens kepada SKPD terkait dengan penyelenggaraan SPIP.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Inspektorat Tahun 2014 disusun, semoga dapat menjadi bahan pertimbangan/evaluasi untuk kegiatan/ kinerja yang akan datang. Sekian dan terima kasih

Semarang,

INSPEKTUR PROVINSI JAWA TENGAH



KUNTO NUGROHO HP

Lampiran 1

Pengukuran Perjanjian Kinerja

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3
Meningkatnya kualitas SDM aparat pengawasan	Jumlah SDM yang meningkat pemahamannya di bidang pengawasan	1 bintek; 1 PKS; 50 orang
Meningkatnya kualitas koordinasi pengawasan dengan APIP dan instansi terkait	Jumlah koordinasi yang dilakukan dengan APIP dan instansi terkait	35 Kab/Kota; 3 Kegiatan
Tercapainya Laporan Keuangan Daerah dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian	1. Opini WTP 5 tahun ke depan di Provinsi Jawa Tengah; 2. Opini WTP 5 tahun ke depan untuk Kab/Kota	1 Provinsi; 13 Kab/Kota
Terciptanya kinerja SKPD Provinsi Jawa Tengah yang efisien dan efektif	Meningkatnya kinerja SKPD Provinsi Jawa Tengah	12 Bulan
Terwujudnya Sistem Pengendalian Intern Pemerintah	Terselenggaranya Sistem Pengendalian Intern Pemerintah	2 SKPD

Program	Anggaran	Keterangan
1	2	3
Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	Rp. 130.000.000,-	Sumber Anggaran dari APBD 100%
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Rp. 242.000.000,-	Sumber Anggaran dari APBD 100%
Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Kebijakan Kepala Daerah	Rp. 9.301.420.000,-	Sumber Anggaran dari APBD 100%
Program Peningkatan sarana dan Prasarana Aparatur	Rp. 3.650.489.000,-	Sumber Anggaran dari APBD 100%
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp. 4.028.876.000,-	Sumber Anggaran dari APBD 100%
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Rp. 145.384.000,-	Sumber Anggaran dari APBD 100%
Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Kebijakan Kepala Daerah	Rp. 1.069.073.000,-	Sumber Anggaran dari APBD 100%

Lampiran 2

Anggaran dan Realisasi Belanja Tahun 2014

No	Jenis Belanja	Program	Kgt	Jml Anggaran	Realisasi	Selisih	%
1	2	3	4	5	6	7	8
A	BOP	Peningkatan Sistem Pengawasan Internal Dan Pengendalian Kebijakan Kepala Daerah	Kegiatan Pengawasan Internal secara berkala	8.605.432.000	8.028.713.501	576.718.499	6,70%
			Penanganan kasus pengaduan dilingkungan pemda, pemeriksaan khusus/strategis atas perintah pejabat berwenang dan MONEV	541.620.000	491.710.080	49.909.920	9,21%
			Kegiatan Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH	1.069.073.000	784.000.545	285.072.455	26,67%

INSPEKTORAT PROVINSI JAWA TENGAH

No	Jenis Belanja	Program	Kgt	Jml Anggaran	Realisasi	Selisih	%
1	2	3	4	5	6	7	8
			Kegiatan Tindak lanjut hasil temuan pengawasan	799.140.000	778.977.800	20.162.200	2,52%
			Kegiatan Koordinasi Pengawasan yang lebih komprehensif	581.825.000	554.174.915	27.650.085	4,75%
			Kegiatan Evaluasi penyelenggaraan pemerintah daerah	356.605.000	296.802.400	59.802.600	16,77%
		Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa Dan Aparat Pengawasan	Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa & aparatur pengawasan	130.000.000	119.891.900	10.108.100	7,78%
Jumlah A dan rata-rata % A				12.083.695.000	11.054.271.141	1.029.423.859	8,52%
B	BAU	Pelayanan administrasi	Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	18.150.000	18.103.890	46.110	0,25%

No	Jenis Belanja	Program	Kgt	Jml Anggaran	Realisasi	Selisih	%
1	2	3	4	5	6	7	8
		perkantoran	Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	410.944.000	410.292.500	651.500	0,16%
			Kegiatan Jaminan Barang Milik Daerah	87.492.000	82.163.185	5.328.815	6,09%
			Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor/Rumah Dinas	106.809.000	106.308.000	501.000	0,47%
			Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor	335.225.000	335.225.000	0	0,00%
			Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan penggandaan	228.700.000	228.700.000	0	0,00%
			Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	19.360.000	19.360.000	0	0,00%
			Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	4.334.000	4.296.000	38.000	0,88%

No	Jenis Belanja	Program	Kgt	Jml Anggaran	Realisasi	Selisih	%
1	2	3	4	5	6	7	8
			Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	8.920.000	8.920.000	0	0,00%
			Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman	100.500.000	100.416.880	83.120	0,08%
			Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi di dalam dan luar Daerah	2.521.700.000	2.469.773.571	51.926.429	2,06%
			Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran	534.819.000	522.896.000	11.923.000	2,23%
		Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur	Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	429.000.000	418.700.000	10.300.000	2,40%
			Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	595.548.000	594.858.850	689.150	0,12%
			Kegiatan Pemeliharaan	485.000.000	480.840.602	4.159.398	0,86%

No	Jenis Belanja	Program	Kgt	Jml Anggaran	Realisasi	Selisih	%
1	2	3	4	5	6	7	8
			Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional				
			Kegiatan Pemeliharaan Rutin /Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	201.976.000	201.248.750	727.250	0,36%
			Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Meubelair	26.400.000	26.392.000	8.000	0,03%
			Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor dan Rumah Tangga	150.683.000	149.484.500	1.198.500	0,80%
			Kegiatan Pemeliharaan Buku- Buku Perpustakaan	10.980.000	10.964.500	15.500	0,14%
			Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor	751.261.000	731.545.000	19.716.000	2,62%

No	Jenis Belanja	Program	Kgt	Jml Anggaran	Realisasi	Selisih	%
1	2	3	4	5	6	7	8
			Kegiatan Rehab Gedung Kantor	1.500.000.000	1.451.041.500	48.958.500	3,26%
		Peningkatan disiplin aparatur	Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya	145.384.000	111.868.000	33.516.000	23,05%
		Peningkatan kapasitas sumber daya apatur pemerintah daerah	Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal	242.000.000	233.842.706	8.157.294	3,37%
Jumlah B dan rata-rata % B				8.915.185.000	8.717.241.434	197.943.566	2,22%
Jumlah (A + B) dan rata-rata % (A+B)				20.998.880.000	19.771.512.575	1.227.367.425	5,84%